



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA  
PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA MODAL (STUDI  
KASUS PADA PROVINSI JAWA BARAT TAHUN  
ANGGARAN 2015-2019)**

SKRIPSI

Desy Ardiyanti Pratama

1602015053

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
JAKARTA  
2020



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA  
PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA MODAL (STUDI  
KASUS PADA PROVINSI JAWA BARAT TAHUN  
ANGGARAN 2015-2019)**

SKRIPSI

Desy Ardiyanti Pratama

1602015053

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
JAKARTA  
2020

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi dengan judul **“PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA MODAL”** merupakan hasil karya sendiri dan sepanjang pengetahuan dan keyakinan saya tidak mencantumkan tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain, atau sebagian bahan yang pernah diajukan untuk gelar atau ijazah pada Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA atau perguruan tinggi lainnya.

Semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila ternyata dikemudian hari hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

Jakarta, 21 Agustus 2020

Yang Menyatakan,



Desy Ardiyanti Pratama  
(NIM. 1602015053)

## PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

**JUDUL** : PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH  
DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP  
BELANJA MODAL

**NAMA** : DESY ARDIYANTI PRATAMA

**N I M** : 1602015053

**PROGRAM STUDI** : AKUNTANSI

**TAHUN AKADEMIK** : 2019-2020

Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diujikan dalam ujian skripsi:

Pembimbing 1	Rito, S.E., Ak., M.Si., CA.	 20/08/2020
Pembimbing 2	Ahmad Sonjaya, S.E., M.Si	

Mengetahui,

Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas  
Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA



Sumardi, S.E., M.Si.

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul:

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA  
PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA MODAL (STUDI KASUS PADA  
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2015-2019)**

Yang disusun oleh:  
Desy Ardiyanti Pratama  
1602015053

Telah diperiksa dan dipertahankan di depan panitia ujian ke sarjanaan strata-satu  
(S1) Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah

Prof. DR. HAMKA

Pada tanggal : 19 Desember 2020

**Tim Penguji :**

Ketua, merangkap anggota :

Rito, S.E., Ak., M.Si., CA.

Sekretaris, merangkap anggota :

Ahmad Sonjaya, S.E., M.Si

Anggota :

Tukir, Ir., MM.

Mengatahui,

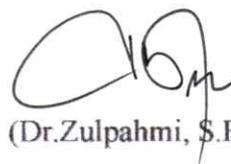
Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas  
Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah  
Prof. DR. HAMKA



(Sumardi, S.E., M.Si.)

v



(Dr. Zulpahmi, S.E., MSi.)

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Desy Ardiyanti Pratama  
NIM : 1602015053  
Program Studi : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Fee Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA MODAL”**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA berhak menyimpan, mengalihmediakan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta  
Pada tanggal : 21 Agustus 2020  
Yang menyatakan,



(Desy Ardiyanti Pratama)

## ABSTRAK

**Desy Ardiyanti Pratama (1602015053)**

“PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA MODAL (STUDI KASUS PADA PROVINSI JAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2015-2019)”. Skripsi Program Strata Satu Program Studi Akuntansi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA. 2020. Jakarta.

*Kata Kunci: Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan.*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan terhadap belanja modal. Penelitian dilakukan pada kabupaten/kota yang terdaftar di Badan Pusat Statistik periode 2015-2019. Sampel dipilih menggunakan metode Purposive sampling dengan jumlah pengamatan sebanyak 6 sampel penelitian. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis akuntansi, analisis statistik deskriptif dan analisis regresi linier berganda. Hasil pengujian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal dengan nilai  $t$  hitung sebesar  $2.064 > t$  tabel sebesar  $2.051$ . Pengaruh Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal dengan nilai  $t$  hitung sebesar  $2.255 > t$  tabel sebesar  $2.051$ . Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan variabel lain selain yang diteliti dalam penelitian ini, menambah tahun pengamatan dan menggunakan sampel dengan Provinsi yang berbeda.

## ABSTRACT

**Desy Ardiyanti Pratama (1602015053)**

"THE EFFECT OF ORIGINAL REGIONAL INCOME, BALANCING FUND ON CAPITAL EXPENDITURE (CASE STUDY IN WEST JAVA PROVINCE 2015-2019 BUDGET YEAR)". Essay. Undergraduate Program in Accounting Study Program. Faculty of Economics and Business Prof. Muhammadiyah University. DR. HAMKA. 2020. Jakarta.

*Keywords: Capital Expenditure, Local Own Income, Balancing Fund. This study aims to determine the effect of local revenue, balance funds on capital expenditure. The research was conducted in districts / cities registered with the Central Bureau of Statistics for the period 2015-2019. The sample was selected using purposive sampling method with the number of observations of 6 research samples. The data analysis technique used is accounting analysis, descriptive statistical analysis and multiple linear regression analysis. The test results show that local revenue has a significant effect on capital expenditure with a t value of  $2.064 > t$  table of 2.051. The effect of Balancing Fund has a significant effect on capital expenditure with a t value of  $2.255 > t$  table of 2.051. Future research is expected to use variables other than those examined in this study, add years of observation and use samples from different provinces.*

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmutallahi Wabarakatuh*

Puji dan syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas rahmat serta hidayah yang telah diberikan oleh-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita semua umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang akan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Pada kesempatan kali ini peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sutrisno dan Ibu Isnin Alfiah selaku orang tua yang selalu memberikan doa dan dukungannya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal”**.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA. Selama proses penyusunan skripsi ini peneliti juga memperoleh dukungan dan bantuan dari beberapa pihak. Pada kesempatan ini pula penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunawan Suryoputro, M.Hum., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
2. Bapak Dr. Nuryadi Wijiharjono, S.E., M.M., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
3. Bapak Zulpahmi, S.E., M.Si., selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
4. Bapak Dr. Sunarta, S.E., M.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
5. Bapak Tohirin, S.H.I., M.Pd.I., selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

6. Bapak Sumardi, S.E., M.Si., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
7. Bapak Rito, S.E., Ak., M.Si., CA selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat serta selalu memberikan masukan apabila ada kesalahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Bapak Ahmad Sonjaya, S.E., M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan dukungan serta arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat baik di dalam kelas maupun di luar kelas sehingga sangat membantu dalam penyusunan skripsi ini.
10. Kedua Orang Tua, Nenek dan Tante yang sudah memberikan semangat serta doa selama Menyusun skripsi ini.
11. Muhammad Arjuka Roihan selaku saudara kandung yang selalu memberikan semangat pantang menyerah selama menyusun skripsi ini.
12. Ali Dwi Leksono teman yang selalu setia meluangkan waktu dan pikirannya untuk membantu peneliti dalam menyusun penelitian ini dan juga sebagai teman yang selalu menemani dari awal masuk kuliah hingga saat ini.
13. Dwi Setiawati, Eva Susanti, Nur Ilmi Alawiyah, Sri Aisyah, Akbar Nurrochman, Dean Adi Karsa, selaku teman seperjuangan akuntansi yang telah memberikan banyak pelajaran hidup selama tujuh semester yang tidak bisa didapatkan di dalam kelas sehingga kita masih berssama sampai hari ini.
14. Semua pihak terkait yang membantu dalam proses penyusunan dari awal proposal skripsi sampai saat ini menjadi sebuah skripsi.

Semoga semua kebaikan yang telah kalian berikan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Akhir kata, peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna baik dalam tata bahasa dan ruang lingkup permasalahan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman peneliti. Oleh karena itu, peneliti menerima berbagai kritik dan saran dari

berbagai pihak yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Besar harapan peneliti semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan juga khususnya bagi peneliti.

*Billahi fii sabililhaq Fastabiqul Khairat*

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Jakarta, 19 Desember 2020

Peneliti,



Desy Ardiyanti Pratama



## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	iii
<b>PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	v
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>ABSTRACT</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>1.1 Latar Belakang</b> .....	1
<b>1.2 Permasalahan</b> .....	9
1.2.1 <i>Identifikasi Masalah</i> .....	9
1.2.2 <i>Pembatasan Masalah</i> .....	9
1.2.3 <i>Perumusan Masalah</i> .....	10
<b>1.3 Tujuan Penelitian</b> .....	10
<b>1.4 Manfaat Penelitian</b> .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	12
<b>2.1 Gambaran Penelitian Terdahulu</b> .....	12
<b>2.2 Kajian Pustaka</b> .....	38
2.2.1 <i>Teori Agensi</i> .....	38
2.2.2 <i>Pendapatan Asli Daerah</i> .....	39
2.2.3 <i>Dana Perimbangan</i> .....	40
2.2.3.1 <i>Pengertian Dana Perimbangan</i> .....	40
2.2.3.2 <i>Macam-macam Dana Perimbangan</i> .....	41
2.2.4 <i>Belanja Modal</i> .....	42
2.2.4.1 <i>Pengertian Belanja Modal</i> .....	42
2.2.4.2 <i>Macam-macam Kategori Belanja Modal</i> .....	43
2.2.4.3 <i>Jenis-Jenis Belanja Modal</i> .....	43
<b>2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis</b> .....	45
<b>2.4 Rumusan Hipotesis</b> .....	47

<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	49
<b>3.1 Metode Penelitian</b> .....	49
<b>3.2 Operasional Penelitian</b> .....	49
<b>3.3 Populasi dan Sampel</b> .....	53
<b>3.4 Teknik dan Pengumpulan Data</b> .....	55
3.4.1 Tempat dan Waktu Penelitian.....	55
3.4.2 Teknik Pengumpulan Data.....	55
<b>3.5 Teknik Pengolahan dan Analisis Data</b> .....	55
3.5.1 Analisis Akuntansi.....	56
3.5.2 Analisis Statistik Deskriptif.....	56
3.5.3 Analisis Regresi Linear Berganda.....	57
3.5.4 Uji Asumsi Klasik.....	57
3.5.5 Uji Hipotesis.....	61
<b>BAB IV PEMBAHASAN</b> .....	66
<b>4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian</b> .....	66
4.1.1 Lokasi Penelitian.....	66
4.1.2 Visi & Misi Badan Pusat Statistik Jawa Barat.....	70
4.1.3 Job Description.....	71
4.1.4 Profil Singkat Kota/Kabupaten Sampel.....	73
<b>4.2 Hasil Pengolahan Data dan Pembahasan</b> .....	78
4.2.1 Hasil Pengolahan Data.....	78
4.2.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	78
4.2.1.2 Dana Perimbangan.....	87
4.2.1.3 Belanja Modal.....	92
4.2.2 Analisis Akuntansi.....	98
4.2.2.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal.....	98
4.2.2.2 Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal.....	100
4.2.2.3 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal.....	102
<b>4.3 Analisis Statistik</b> .....	105
4.3.1 Analisis Statistik Deskriptif.....	105
4.3.2 Analisis Linear Berganda.....	106
4.3.3 Uji Asumsi Klasik.....	108
4.3.4 Uji Hipotesis.....	113
4.3.5 Analisis koefisien determinasi ( $R^2$ ).....	115
<b>4.4 Hasil Interpretasi Penelitian</b> .....	116
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	126
<b>5.1 Kesimpulan</b> .....	126

5.2 Saran .....	129
DAFTAR PUSTAKA.....	131
LAMPIRAN	



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Setiap provinsi terbagi atas daerah dengan kabupaten/kota yang masing-masing memiliki pemerintah daerah. Banyaknya daerah di Indonesia mengakibatkan pemerintah pusat sulit mengkoordinasi pemerintahan yang ada di daerah, sehingga untuk memudahkan pelayanan dan penataan pemerintahan, pemerintah pusat mengubah kebijakan yang tadinya berasas sentralisasi menjadi desentralisasi. Dengan kata lain, otonomi daerah merupakan kewenangan daerah untuk mengambil keputusan sendiri dalam hal mengelola sumber daya yang memiliki potensi dan kepentingan daerah itu sendiri dan tidak bergantung subsidi dari pusat. Dengan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, setiap daerah dituntut untuk dapat menggali sumber keuangan di daerahnya.

Pemerintahan yang terdesentralisasi bertujuan agar pemerintah daerah dapat lebih dekat dengan masyarakatnya dan lebih memahami aspirasi serta kebutuhan masyarakatnya. Sedangkan hak dan kewajiban daerah sendiri diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintahan daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah yang dirumuskan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) (Qonita, 2014: 23).

APBD adalah suatu rencana kerja pemerintah daerah yang mencakup seluruh pendapatan atau penerimaan dan belanja atau pengeluaran pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, dan kota dalam rangka mencapai sasaran pembangunan dalam kurun waktu satu tahun yang dinyatakan dalam satuan uang dan disetujui oleh DPRD dalam peraturan perundangan yang disebut Peraturan Daerah. (Badrudin, 2014: 97). Menurut UU Nomor 71 Tahun 2010 Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Jenis Belanja Modal menurut peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2016 pasal 53 ayat 1 terbagi dalam 5 pos yaitu belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja irigasi dan jaringan, belanja aset lainnya. Menurut PSAP Nomor 2, Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Anggaran Belanja Modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik berupa peralatan, bangunan, infrastruktur dan harta tetap lainnya. Tetapi fakta yang terjadi di daerah belanja modal kurang mendapat perhatian serius atau belum menjadi prioritas utama dalam anggaran pemerintah daerah (Abdul, 2013: 27).

Fenomena ini terjadi pada hasil audit atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Provinsi Jawa Barat untuk yang ke delapan kali secara berturut sejak tahun 2011-2018. Pendapatan daerah pada perubahan APBD Tahun 2019

sebesar Rp 36,127 triliun. Jumlah ini meningkat sebesar Rp 1,244 triliun atau naik 3,57 persen dibandingkan dengan target pada APBD murni 2019, Rp 34,882 triliun. Pendapatan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan. (Bpk.go.id, 2018).

Sementara dengan belanja daerah di tahun 2019 diperkirakan sebesar Rp 39,111 triliun. Jumlah ini meningkat sebesar Rp 2,055 triliun dari anggaran belanja murni 2019 atau naik sebesar 5,55 persen dibandingkan pada APBD murni sebesar Rp 37,055 triliun. (Bpk.go.id, 2018).

Selain Pendapatan Asli Daerah yang merupakan masalah utama yang akan menunjang kegiatan operasional tiap daerah dalam rangka mencapai tujuannya. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Tingkat kemandirian daerah semakin naik Pendapatan Asli Daerah akan mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat akan berkurang.

Pelaporan dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengenai penurunan PPh pasal 22 atau pemungutan pajak atas kegiatan perdagangan ekspor, impor dan re-impor dalam realisasi penerimaan pajak per 31 juli 2015 dibanding dengan satu periode tahun lalu sebesar Rp 228,66 miliar. Realisasi penerimaan PPh pasal 22 sebesar Rp 3,337 triliun atau mengalami turun sebesar 6,43 persen dibandingkan periode tahun lalu yang sebesar Rp 3,566 triliun “Masih belum membaiknya penerimaan dari PPh pasal 22 merupakan indikasi belum terserapnya anggaran belanja pemerintah dengan optimal, khususnya belanja

modal,” fenomena ini ditulis oleh Direktorat Jendral Pajak yang diunggah di [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id), dikutip [www.kompas.com](http://www.kompas.com) Jumat (7/8/2015).

Menurut Direktorat Jenderal Pajak, PPh pasal 22 impor adalah dua jenis penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) non-migas yang mengalami penurunan. Realisasi PPh pasal 22 impor per 31 juli 2015 sebesar Rp 23,681 triliun atau turun 8,52 persen dibandingkan periode tahun lalu sebesar Rp 25,886 triliun. Ditemui dikantor Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang PS Brodjonegoro memastikan pemerintah akan mendorong penyerapan belanja modal pada kuartil III-2015. “sampai akhir tahun penyerapan belanja modal antara 80-85 persen.” Fenomena ini dikutip Bambang, Jumat (7/8/2015).

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal yang dilakukan oleh (Halim, 2015) dari hasil penelitian menemukan bahwa Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Daerah secara keseluruhan di kabupaten/kota seJawa dan Bali. Berbeda dengan hasil penelitian oleh (Putro, 2018) menemukan bahwa Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Pengalokasian Belanja Modal di Kota Jakarta.

Selain Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan juga memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal dimana Dana Perimbangan adalah pendapatan yang masuk kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Yang dimana dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah (otonom) dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dalam rangka

pelaksanaan Desentralisasi. Perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan dengan berbagai klasifikasi dari dana perimbangan.

Selanjutnya belanja modal adalah Pengeluaran untuk pembayaran perolehan Aset Tetap atau aset lainnya atau menambah nilai Aset Tetap atau aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi Aset Tetap atau aset lainnya yang ditetapkan Pemerintah. Aset Tetap atau aset lainnya tersebut dipergunakan atau dimaksudkan untuk dipergunakan untuk operasional Kegiatan suatu Satker atau dipergunakan oleh masyarakat atau publik, tercatat sebagai aset Kementerian atau Lembaga terkait dan bukan dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat atau Pemda (<http://www.djpk.kemenkeu.go.id/> : 2018).

Dalam pembukuan nilai perolehan aset dihitung semua pendanaan yang dibutuhkan hingga aset tersebut tersedia dan siap untuk digunakan. Kriteria kapitalisasi dalam pengadaan atau pemeliharaan barang atau aset merupakan suatu tahap validasi untuk penetapan belanja modal atau bukan dan merupakan syarat wajib dalam penetapan kapitalisasi atas pengadaan barang atau aset ([djpk.kemenkeu.go.id/](http://djpk.kemenkeu.go.id/): 2018)

1. Pengeluaran anggaran belanja tersebut mengakibatkan bertambahnya aset dan/ atau bertambahnya masa manfaat/umur ekonomis aset berkenaan. Pengeluaran anggaran belanja tersebut mengakibatkan bertambahnya kapasitas, peningkatan standar kinerja, atau volume aset.

2. Memenuhi nilai minimum kapitalisasi sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penatausahaan Barang Milik Negara (BMN).
3. Pengadaan barang tersebut tidak dimaksudkan untuk diserahkan / di pasar kan kepada masyarakat / Pemda / entitas lain di luar Pemerintah Pusat.

Pengalokasian sumber daya ke dalam anggaran belanja modal merupakan proses yang sarat dengan kepentingan-kepentingan politis. Anggaran ini sebenarnya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan publik akan sarana dan prasarana umum yang disediakan oleh pemerintah daerah. Namun, adanya kepentingan politik dari lembaga legislatif yang terlibat dalam penyusunan proses anggaran menyebabkan alokasi belanja modal terdistorsi dan sering tidak efektif dalam memecahkan permasalahan di masyarakat (Ummu Khoiriah, 2015:19).

Kecilnya penyerapan anggaran untuk belanja modal dikhawatirkan dapat mengganggu kinerja dan kualitas pelayanan publik yang seharusnya diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Banyak proyek pembangunan infrastruktur daerah yang belum terlaksana dan menghambat pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemerintah daerah seharusnya memperbesar porsi alokasi belanja modal tkhususnya pada belanja modal bagian sektor publik seperti peralatan dan infrastruktur untuk meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat, karena semakin tinggi belanja modal semakin tinggi pula produktivitas perekonomian.

Upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagian sektor publik, pemerintah daerah wajib mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap.

Belanja modal memiliki karakteristik spesifik yang menunjukkan adanya berbagai pertimbangan dalam pengalokasian. Belanja modal yang dilakukan pemerintah daerah antara lain pada sektor pendidikan, kesehatan, transportasi sehingga masyarakat merasakan manfaat dari pembangunan ekonomi daerah.

Pendapatan dan belanja daerah dalam APBD 2017 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2016 adapun presentasi yang didapat pada tahun 2017 yaitu 1,9 persen dibanding tahun 2016 yaitu 0,5 persen terlihat mengalami defisit. Terlihat dari jumlahnya mengalami defisit di tahun 2016 yang lebih rendah 13,4 Rупiah Triliun. Lebih rendah dari tahun sebelumnya adapun selisih 12,5 Triliun rупiah atau 20,28 persen. (Bps.go.id: 2017).

Komposisi pendapatan daerah memiliki tiga bagian utama yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Dana Perimbangan yang mendominasi dari sumber pendapatan daerah yaitu 66,1 persen dari 664,5 triliun rупiah dari total pendapatan daerah sebesar 1.005,2 triliun rупiah.

Komposisi Pendapatan Asli Daerah memiliki empat bagian utama yaitu pajak daerah, retribusi daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pajak daerah adalah sumber pendapatan tertinggi dari PAD yaitu 69,5 persen dari 168,8 triliun rупiah. Retribusi daerah 4,8 persen dari 11,7 triliun rупiah. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 3,2 persen dari 7,7 triliun rупiah. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yaitu 22,6 persen dari 54,8 triliun.

Komposisi Dana Perimbangan memiliki tiga bagian utama yaitu Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Bagi Hasil yaitu 12,8 persen dari 84,9 triliun rupiah, Dana Alokasi Umum yaitu 61,6 persen dari 409,2 triliun rupiah, Dana Alokasi Khusus yaitu 25,6 persen dari 170,3 triliun rupiah.

Komposisi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah memiliki enam bagian utama yaitu Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Pendapatan Lain-Lain, Pendapatan Hibah, Pendapatan Dana Darurat. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus yaitu 73,69 persen dari 71,9 triliun rupiah, Pendapatan Lain-Lain yaitu 21,55 persen dari 21,0 triliun rupiah. Pendapatan Hibah yaitu 4,71 persen dari 4,6 triliun rupiah, Pendapatan Dana Darurat yaitu 0,05 persen dari 46,5 miliar rupiah.

(Bps.go.id : 2017)

Penelitian yang dilakukan oleh (Abdullah dan Halim, 2015: 25), menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap variabel Belanja Modal di kabupaten/kota se Jawa. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Kusnandar dan Dodik, 2014: 35), menunjukkan bahwa dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap alokasi Belanja Modal. Penelitian yang dilakukan (Saptaningsih, 2019): menunjukkan bahwa dana perimbangan berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi Belanja Modal Daerah, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (S Y Mamonto dan Krest D T, :2015: 65) menunjukkan hasil yang berbeda bahwa dana perimbangan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap belanja modal.

Penelitian mengenai Belanja Modal ini telah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu. Berdasarkan yang telah dijelaskan di atas, peneliti tertarik untuk

mengambil judul: **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal (Studi Kasus pada Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2015-2019).**

## **1.2 Permasalahan**

### *1.2.1 Identifikasi Masalah*

Adapun identifikasi masalahnya sebagai berikut:

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh secara parsial terhadap Belanja Modal?
2. Apakah Dana Perimbangan berpengaruh secara parsial terhadap Belanja Modal?
3. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Perimbangan berpengaruh secara bersama-sama terhadap Belanja Modal?

### *1.2.2 Pembatasan Masalah*

Agar penelitian ini tidak menyimpang dan tidak keluar dari tujuan awal yang telah direncanakan sehingga mempermudah mendapatkan data dan informasi yang diperlukan, agar penelitian lebih terfokus maka peneliti membatasi masalah pada:

1. Periode penelitian ini adalah 2015-2019
2. Penelitian ini di Provinsi Jawa Barat (sampel sebanyak 6 kab/kota)

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini tiga variabel Independen, yaitu: Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan dan varibel dependen yaitu Belanja Modal.

### *1.2.3 Perumusan Masalah*

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka dibuat perumusan masalah yang diharapkan dapat bermanfaat dalam upaya mencari jawaban mengenai masalah:

1. Bagaimana Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh secara parsial terhadap Belanja Modal?
2. Bagaimana Dana Perimbangan berpengaruh secara parsial terhadap Belanja Modal?
3. Bagaimana Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Perimbangan berpengaruh secara simultan memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun peneliti, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Pengaruh secara parsial Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal pada (Studi Kasus Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2015-2019).
2. Untuk mengetahui Pengaruh secara parsial Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal pada (Studi Kasus Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2015-2019).
3. Untuk mengetahui Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap belanja modal pada (Studi Kasus Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2015-2019).

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

##### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran serta memperluas pemahaman mengenai Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal. Bagi Pengembangan Ilmu, Bagi Akademik dan Bagi Peneliti.

##### 2. Manfaat Praktis

Bagi Pemerintah Kabupaten dan Kota Jawa Barat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pentingnya mengoptimalkan potensi lokal yang dimiliki daerah untuk peningkatan kualitas pelayanan publik dan demi kemajuan daerah dan dapat menjadi bahan pertimbangan kabupaten dan kota dalam pengambilan kebijakan bagi daerahnya. Sehingga kedepannya dapat mengambil kebijakan yang lebih tepat agar daerahnya makin berkembang dan maju.

##### 3. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada investor bahwa otonomi yang diselenggarakan pemerintah berjalan baik di kabupaten dan kota sehingga bisa menarik minat investor untuk berinvestasi. Faktor kelembagaan menjadi daya tarik investasi di daerah. Kelembagaan ini menyangkut pelayanan, kebijakan pemerintah daerah, dan kepastian hukum.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Gambaran Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang berkenaan dengan belanja modal telah banyak dilakukan. Penelitian-penelitian tersebut antara lain:

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Ari Juniawan & santi suryantini, (2018), dengan judul “Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal kota dan kabupaten di Provinsi Bali”. Penelitian ini bertujuan untuk memperjelas bagaimana penerimaan daerah diantaranya Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus mempengaruhi Belanja Modal. Penelitian ini dilakukan di satu kota dan delapan kabupaten di Provinsi Bali yang tidak merata sehingga adanya perbedaan tiap pelayanan dan fasilitas publik di masing-masing kabupaten dan kota.

Hasil penelitian ini menunjukkan Angka koefisien sebesar -20.888 menjelaskan apabila angka Pendapatan Asli Daerah ( $X_1$ ), Dana Alokasi Umum ( $X_2$ ) dan Dana Alokasi Khusus ( $X_3$ ) sama dengan nol, angka Belanja Modal ( $Y$ ) berjumlah -20.888 satuan; Angka koefisien  $\beta_1 = 0,648$  menjelaskan bahwa angka PAD bertambah satu satuan, angka Belanja Modal akan meningkat berjumlah 0,648 satuan dengan ceteris paribus; Angka koefisien  $\beta_2 = 5.289$  menjelaskan jika angka DAU bertambah satu satuan, angka Belanja Modal akan meningkat berjumlah 5.289 satuan dengan ceteris paribus; Angka koefisien  $\beta_3 = 0,014$

menjelaskan jika angka DAU bertambah satu satuan, angka Belanja Modal akan meningkat berjumlah 0.014 satuan dengan ceteris paribus.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Maslikah (2014), dengan judul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Kasus pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah)”. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah tiga puluh lima kabupaten/kota di Jawa Tengah yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari tahun 2009-2011 yang diperoleh melalui website [www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id).

Hasil penelitian ini menunjukkan Angka koefisien 0,25 satuan dari Pertumbuhan Ekonomi maka Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal. Sedangkan angka koefisien 0,35 satuan dari Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum maka PAD dan DAU berpengaruh signifikan terhadap Anggaran Belanja Modal. Karena hasilnya  $0,25 > 0,35$ .

Penelitian yang dilakukan oleh Furqani dan Titimmah (2015), “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Sumenep (Periode 2009-2013)”. Hasil penelitian ini menunjukkan analisa secara simultan hasil variabel independen (Pertumbuhan Ekonomi Dan Pendapatan Asli Daerah) berpengaruh signifikan terhadap variabel independen Belanja Modal hasil angka koefisien  $\beta_1 =$

0,33 analisa secara parsial Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, sedangkan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap anggaran Belanja Modal hasil angka koefisien  $\beta_2 = 0,44$ . Maka  $0,33 > 0,44$ .

Penelitian sebelumnya juga pernah dilakukan oleh Agung, Mantra, Indah, & Dewi, (2018), dengan judul “Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal.” Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil dan belanja pegawai terhadap pengalokasian anggaran belanja modal pada pemerintah provinsi di Indonesia yaitu sebanyak 32 provinsi. Analisis dilakukan dengan menggunakan model regresi berganda.

Hasil penelitian menunjukkan Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Pengalokasian Belanja Modal  $\beta_1 = 0,34$ . Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan negatif terhadap Pengalokasian Belanja Modal  $\beta_2 = 0,22$ . Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh signifikan positif terhadap Pengalokasian Belanja Modal, Dana Bagi Hasil berpengaruh signifikan positif terhadap Pengalokasian Belanja Modal  $\beta_3 = 0,23$ . Belanja Pegawai berpengaruh signifikan positif terhadap pengalokasian belanja modal. dengan angka koefisien  $\beta_1 = 0,563$ .

Penelitian sebelumnya juga pernah dilakukan oleh Purwanto (2015), dengan judul “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Alokasi Umum, Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Realisasi Belanja Modal”. Penelitian ini menggunakan metode eksplanatif Data Sekunder Laporan Realisasi APBD. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pertumbuhan

Ekonomi Dan PDRB, Tidak Berpengaruh Signifikan Terhadap Alokasi Belanja Modal ditunjukkan dengan nilai koefisien 0,32. Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Berpengaruh Positif Dan signifikan Terhadap Alokasi Belanja Modal ditunjukkan dengan nilai koefisien 0,24 ( $0,32 < 0,24$ ).

Penelitian sebelumnya juga pernah dilakukan oleh murhani kasdy, Nadirsyah, & Fahlevi, (2018), “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2016.” Populasi dalam penelitian ini adalah kabupaten dan kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Data yang digunakan berasal dari laporan Laporan Realisasi APBD tahun 2010-2016. Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Terdapat pengaruh positif dan signifikan Pendapatan Asli Daerah ( $X_1$ ) terhadap Belanja Modal (Y) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, ditunjukkan dengan nilai koefisien korelasi ( $r_{x_1y}$ ) = 0,739, koefisien determinasi ( $r^2_{x_1y}$ ) = 0,546 dan t hitung 6,302 > t tabel 2,040. Terdapat pengaruh positif dan signifikan Dana Alokasi Umum ( $X_2$ ) terhadap Belanja Modal (Y) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, ditunjukkan dengan nilai koefisien korelasi ( $r_{x_2y}$ ) = 0,806, koefisien determinasi ( $r^2_{x_2y}$ ) = 0,650 dan t hitung 7,824 > t tabel 2,040. Terdapat pengaruh positif dan signifikan Dana Alokasi Khusus ( $X_3$ ) terhadap Belanja Modal (Y).

Penelitian sebelumnya juga pernah dilakukan oleh Jannah, Wahono, & Salim, (2017), dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dan Dana Bagi Hasil (DBH)

Terhadap Pengalokasian Belanja Modal (Studi Kasus Pemerintahan Kabupaten Gresik Periode 2009–2015).” Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masalah peningkatan jumlah lokal yang tidak disertai dengan peningkatan anggaran belanja modal yang signifikan. Pendapatan daerah yang tinggi diikuti oleh dana alokasi umum yang tinggi serta dana untuk hasil di Kabupaten Gresik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai koefisien dari tiap variabel sebesar Belanja Modal 6.745 Pendapatan Asli Daerah 0.658 Dana Alokasi Umum 0.783 Dana Alokasi Khusus 2.375 Dana Bagi Hasil 1.954.

Penelitian sebelumnya juga pernah dilakukan oleh Gede, Atika, Kepramareni, & Gde, (2017), dengan judul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Alokasi Belanja Modal Kabupaten/Kota Se-Bali.” Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa Laporan Realisasi APBD pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Belanja Modal = 3,766 Pendapatan Asli Daerah 0,257 Dana Alokasi Umum 0,053 Dana Bagi Hasil 0,058 Dana Alokasi Khusus 1,313 SILPA 0,170.

Penelitian sebelumnya juga pernah dilakukan oleh Paramartha dan Budiasih (2016), dengan judul “Pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap Belanja Modal”. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif Sampel yang diambil sebanyak 9 Kabupaten dan Kota di Bali tahun 2009-2013.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai koefisien PAD 0,45 dan DAK 0.33. PAD dan DAK berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Terjadi fenomena Flypaper Effect di Provinsi Bali.

Penelitian sebelumnya juga pernah dilakukan oleh murhani kasy et al., (2018), dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi Pada Kabupaten/Kota Di Wilayah Aceh)”. Tim Peneliti dari Public Expenditure Analysis Or Capacity Strengthening Program (PECAPP) yang tercatat sejak tahun 2008 hingga tahun 2012, dengan catatan sebesar Rp 5,4 trilliun belanja modal dinyatakan sudah dibelanjakan oleh pemerintahan Aceh. Seluruh pembangunan jalan atau jembatan memiliki porsi yang lebih besar dari belanja infrastruktur Aceh sebelumnya yang tercatat sebesar 44%.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai koefisien 0,23 dari Pendapatan Asli Daerah, nilai koefisien 0,45 dari DAU dan nilai koefisien 0,35 dari DBH. Maka  $0,23 > 0,45$  serta  $0,45 < 0,35$ . Penelitian sebelumnya juga pernah dilakukan oleh Santika Adhi Karyadi, (2017), “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011–2014.”

Hasil penelitian ini menunjukkan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2014, ditunjukkan dengan angka koefisien korelasi ( $r^{1y}$ ) sebesar 0,783; koefisien determinasi ( $r^2$   $x^2y$ ) 0,614; t hitung 13,217 > t tabel 1,98137. Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap

Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2014, ditunjukkan dengan angka koefisien korelasi ( $r_{x_2y}$ ) sebesar 0,658; koefisien determinasi ( $r^2_{x_2y}$ ) 0,433;  $t$  hitung 9,168 >  $t$  tabel 1,98137.

Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2014, ditunjukkan dengan angka koefisien korelasi ( $r_{x_3y}$ ) sebesar 0,166; koefisien determinasi ( $r^2_{x_3y}$ ) 0,028;  $t$  hitung 1,770 <  $t$  tabel 1,98137. Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2014, ditunjukkan dengan angka koefisien korelasi ( $R_{y(1,2,3)}$ ) sebesar 0,864; koefisien determinasi ( $R^2_{y(1,2,3)}$ ) 0,747;  $F$  hitung 106,184 >  $F$  tabel 2,69.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Hanisya Ursilla Lubis, (2019), dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi Kasus Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan).”

Hasil dari penelitian ini menunjukkan Pengujian Pendapatan Asli Daerah ( $X_1$ ) terhadap Belanja Modal Diketahui  $t$  hitung >  $t$  tabel yaitu 9,459 > 2,016 dengan nilai signifikan 0,001 < 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Artinya secara parsial pendapatan asli daerah berpengaruh dan signifikan terhadap belanja modal kota Medan. Pengujian terhadap Dana Alokasi Umum ( $X_2$ ) terhadap Belanja Modal Diketahui  $t$  hitung >  $t$  tabel yaitu 10,976 > 2,016 dengan nilai signifikan 0,000 < 0,05. Dengan demikian

dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Artinya secara parsial dana alokasi umum berpengaruh dan signifikan terhadap belanja modal kota Medan.

Pengujian terhadap Dana Alokasi Khusus ( $X_3$ ) terhadap Belanja Modal Diketahui  $t$  hitung  $>$   $t$  tabel yaitu  $7,19 > 2,016$  dengan nilai signifikan  $0,001 < 0,05$ . Dengan demikian dapat disimpulkan  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Artinya secara parsial dana alokasi umum berpengaruh dan signifikan terhadap belanja modal kota Medan. 4. Pengujian terhadap Dana Bagi Hasil ( $X_4$ ) terhadap Belanja Modal Diketahui  $t$  hitung  $>$   $t$  tabel yaitu  $5,567 > 2,016$  dengan nilai signifikan  $0,000 < 0,05$ . Dengan demikian dapat disimpulkan  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Artinya secara parsial dana bagi hasil berpengaruh dan signifikan terhadap belanja modal kota Medan.

Penelitian sebelumnya juga pernah dilakukan oleh Anjar Guritno dan Leny Suzan, (2014), (Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom, Bandung) "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pada kabupaten/kota di Bandung Raya Tahun 2008-2013." Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Bandung Raya tahun 2008-2013. Secara parsial Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Belanja Modal, sedangkan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif namun tidak signifikan dikarenakan peningkatan Dana Alokasi Umum relatif kecil, maka nilai koefisien sebesar 2,88 PAD dan nilai koefisien dari DAU sebesar 2,55 hasil  $2,88 < 2,55$ .

*Previous research has also been carried out by Asri Raini, Suzan, & Putra Khirna Mahardika, (2017) “The Influence Of Local Own-Source Revenue, General Allocation Fund, And Special Allocation Fund To Budget Realization Of Capital Expenditure (Empiric Study On Province In Java Island Period 2009-2014)”.*

*The results of this study indicate that the Regional Original Revenue, the General Allocation Fund, the Special Allocation Fund jointly influence the capital expenditure. Partially  $0,222 > 0,05$  , the Regional Original Revenue has a positive effect on capital expenditure  $0,273 > 0,05$  , while the General Allocation Fund and Special Allocation Fund have no effect on capital expenditure  $0,003 < 0,005$ .*

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus secara bersama-sama mempengaruhi belanja modal. Secara parsial, Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif pada belanja modal, sedangkan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh pada belanja modal.

*Previous research has also been carried out by Marsyaf & Anasta, (2019) “The Effect Of Regional Original Income (PAD), General Allocation Funds (DAU), Special Allocation Funds (DAK) And Area Of Areas On Capital Expenditure (Case Study In Regency / City On Java Island In 2016)”.* This study uses statistical analysis methods in the form of multiple linear regression tests.

*The results of this study indicate that simultaneously local revenue variables, general allocation funds, special allocation funds and area size significantly influence capital expenditure. Partially, local revenue variable, special allocation*

*fund, and area size have a significant effect on capital expenditure. while the general allocation fund variable does not significantly influence capital expenditure  $0,045 > 0,005$ .*

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel pendapatan lokal, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan ukuran area secara signifikan mempengaruhi belanja modal. Secara parsial, variabel pendapatan lokal, dana alokasi khusus, dan ukuran area berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. sedangkan variabel dana alokasi umum tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

*Previous research has also been carried out by Muti'ah, (2017), "The Effect of Regional Revenue, Revenue Sharing Fund, General Allocation Fund and Special Allocation Fund on Regional Economic Growth (Empirical Study In the 33 Provinces in Indonesia Year 2011-2014)." This study uses descriptive statistical methods, with multiple linear regression models.*

*The results of this study indicate that Regional Revenue (RR) has a positive and significant impact on regional economic growth  $0,223 > 0,005$ , Revenue Sharing Funds (RSF) has a negative impact on economic growth regional, being a general allocation fund (GAF) and a special allocation fund (SAF) has no impact on economic growth regional.*

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Regional Revenue (RR) memiliki dampak positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional, Dana Bagi Hasil (RSF) memiliki dampak negatif pada pertumbuhan ekonomi regional,

menjadi dana alokasi umum (GAF) dan alokasi khusus dana (SAF) tidak berdampak pada pertumbuhan ekonomi regional.

*Previous research has also been carried out by Juanda, Fauzi, & Mulatsih, (2018), "Specific Allocation Funds, Economic Growth, and Unemployment: A Case Study in Banten Province, Indonesia". This Study Uses The Estimated Equation Model Method Two Stage Least Square (2SLS) Metode.*

*The results of this study indicate that the specific allocation funds do not affect capital expenditure in Indonesia's district areas, but do so in cities. Special allocation funds have a significant influence on economic growth and unemployment through the transmission of capital expenditure value is  $0,342 > 0,005$ .*

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dana alokasi khusus tidak mempengaruhi belanja modal di wilayah kabupaten Indonesia, tetapi melakukannya di kota-kota. Dana alokasi khusus memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengangguran melalui transmisi belanja modal.

*Previous research has also been carried out by Asnawi Asnawi and Zeni Sri Ulan (2018), "The Effect Of Regional Original Income (PAD), General Allocation Funds (DAU), And Special Allocation Funds (DAK) On Capital Expenditures In District And Cities In Java Island".*

*The results of this study indicate that: regional original income has a significant effect on capital expenditure, general allocation funds have a significant effect on capital expenditure is  $0,481 > 0,05$ .  $B_1 > \beta_2$   $0,356 > 0,05$ ,*

*special allocation funds do not have a significant effect on capital expenditure, regional income, general allocation funds, special allocation funds simultaneously have an influence on spending capital of the island of Java government.*

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, dana alokasi khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, pendapatan daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus secara bersamaan memiliki pengaruh terhadap pengeluaran modal pemerintah pulau Jawa.

*Previous research has also been conducted by Gounder, Neelesh., Narayan, Paresh Kumar., And Prasad, Meaning (2017), "An Empirical investigation of the relationship between government revenue and expenditure on capital shopping: The Case of the Fiji Islands." to investigate the relationship between government revenue and expenditure on Fiji.*

*The results of this study indicate that: The findings of this paper should enable policy makers to make the right decisions. In addition, this paper is different from the others because in addition to examining income and expenses in the aggregate, this paper also considers different components of income and expenses.*

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Temuan dari makalah ini harus memungkinkan pembuat kebijakan untuk membuat keputusan yang tepat. Selain itu, makalah ini berbeda dari yang lain karena selain memeriksa pendapatan dan

pengeluaran secara agregat, makalah ini juga mempertimbangkan berbagai komponen pendapatan dan pengeluaran.

*Previous research has also been conducted by Ari Juniawan (2018), "The Influence Of PAD, DAU And DAK On Capital And District Shopping In Bali Province" The study population was all districts and cities in Bali Province, while the sample was determined using the total population sampling method. The analytical tool used is multiple linear regression analysis.*

*The results of this study indicate that: Local Revenue has a positive effect on Capital Expenditure, General Allocation Funds have a positive effect on Capital Expenditures, Special Allocation Funds have a positive effect on Capital Expenditures is  $0,654 > 0,05$ .*

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pendapatan Daerah berpengaruh positif terhadap Pengeluaran Modal, Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Pengeluaran Modal, Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Pengeluaran Modal.

**Tabel 1**  
**Ringkasan Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Ari Juniawan, Ni Putu Santi Suryanti (2018)	Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal kota dan kabupaten di Provinsi Bali.	X <sub>1</sub> : Pendapatan Asli Daerah X <sub>2</sub> : Dana Alokasi Umum X <sub>3</sub> : Dana Alokasi Khusus Y: Belanja Modal	Hasil peneliti menunjukkan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal, Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal, Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.
2.	Maslikah (2014)	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Kasus pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah)	X <sub>1</sub> : Perumbuhan Ekonomi X <sub>2</sub> : Pendapatan Asli Daerah X <sub>3</sub> : Dana Alokasi Umum Y: Pengalokasian Anggaran Belanja Modal	Hasil peneliti menunjukkan Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Anggaran Belanja Modal.

(Lanjutan)

Tabel 1

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
3	Furqani dan Titimma (2015)	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Pemkab Sumenep (Periode 2009-2013)	X <sub>1</sub> : Pertumbuhan Ekonomi X <sub>2</sub> : Pendapatan Asli Daerah Y: Pengalokasian Anggaran Belanja Modal	Hasil peneliti menunjukkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. sedangkan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap anggaran belanja modal.
4.	Ikhwan Prasetya (2017)	Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal.	X <sub>1</sub> : Dana Alokasi Umum X <sub>2</sub> : Pendapatan Asli Daerah Y: Belanja Modal	Hasil peneliti menunjukkan Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Pengalokasian Belanja Modal. Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan negatif terhadap Pengalokasian Belanja Modal. Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh signifikan

(Lanjutan)

Tabel 1

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
				positif terhadap Belanja Modal, Dana Bagi Hasil berpengaruh signifikan positif terhadap Pengalokasian Belanja Modal.
5	Purwanto (2015)	Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Alokasi Umum, Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Realisasi Belanja Modal	X <sub>1</sub> : Pertumbuhan Ekonomi X <sub>2</sub> : Pendapatan Asli Daerah X <sub>3</sub> : Dana Alokasi Umum X <sub>4</sub> : Produk Domestik Regional Bruto Y: Realisasi Belanja Modal	Hasil peneliti menunjukkan Pertumbuhan Ekonomi Dan PDRB, Tidak Berpengaruh Signifikan Terhadap Alokasi Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Berpengaruh Positif Dan signifikan Terhadap Alokasi Belanja Modal.

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2020

(Lanjutan)

Tabel 1

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
6.	Lailatul Mubasiroh (2018)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2016.	X <sub>1</sub> : Pendapatan Asli Daerah X <sub>2</sub> : Dana Alokasi Umum X <sub>3</sub> : Dana Alokasi Khusus Y: Belanja Modal	Hasil peneliti menunjukkan Terdapat pengaruh positif dan signifikan Dana Alokasi Khusus (X <sub>3</sub> ) terhadap Belanja Modal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Terdapat pengaruh positif Pendapatan Asli Daerah , Dana Alokasi Umum.
7.	Roihatul Jannah, Budi Wahono, M. Agus Salim (2017)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi	X <sub>1</sub> : Pendapatan Asli Daerah X <sub>2</sub> : Dana Alokasi Umum X <sub>3</sub> : Dana Alokasi	Hasil peneliti menunjukkan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum, Tidak Berpengaruh Signifikan Terhadap Pengalokasian Belanja

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2020

(Lanjutan)

Tabel 1

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
		Khusus (DAK), Dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Pengalokasian Belanja Modal (Studi Kasus Pemerintahan Kabupaten Gresik Periode 2009–2015).	Khusus X <sub>4</sub> : Dana Bagi Hasil Y: Pengalokasian Belanja Modal.	Modal, PAD Dan DAU Berpengaruh Positif Dan signifikan Terhadap Pengalokasian Belanja Modal.
8.	Desak Gede Yudi Atika Sari Putu Kepramareni Ni Luh Gede Novitasari (2017)	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Alokasi Belanja Modal Kab/Kota	X <sub>1</sub> : Pertumbuhan Ekonomi X <sub>2</sub> : Pendapatan Asli Daerah X <sub>3</sub> : Dana Perimbangan X <sub>4</sub> : Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Hasil peneliti menunjukkan Pertumbuhan Ekonomi dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tidak berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal. PAD dan Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal.

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2020

(Lanjutan)

Tabel 1

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
		Se-Bali.	Y: Alokasi Belanja Modal.	
9.	Paramartha dan Budiasih (2016)	Pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap Belanja Modal.	X <sub>1</sub> : Pendapatan Asli Daerah X <sub>2</sub> : Dana Alokasi Umum X <sub>3</sub> : Dana Alokasi Khusus Y: Belanja Modal.	Hasil peneliti menunjukkan PAD dan DAK berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Terjadi fenomena <i>Flypaper Effect</i> di Provinsi Bali.
10.	Susi Susanti dan Heru Fahlevi (2016)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Bagi Hasil Terhadap	X <sub>1</sub> : Pendapatan Asli Daerah X <sub>2</sub> : Dana Alokasi Umum X <sub>3</sub> : Dana Bagi Hasil	Hasil peneliti menunjukkan PAD dan DAU berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Tetapi DBH berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2020

(Lanjutan)

Tabel 1

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
		Belanja Modal (Studi Pada Kabupaten/ Kota Di Wilayah Aceh)	Y: Belanja Modal	
11.	Santika Adhi Karyadi (2017)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011–2014	X <sub>1</sub> : Pendapatan Asli Daerah X <sub>2</sub> : Dana Alokasi Umum X <sub>3</sub> : Dana Alokasi Khusus Y: Belanja Modal	Hasil peneliti menunjukkan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2014

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2020

(Lanjutan)

Tabel 1

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
12.	Hanisya Ursilla Lubis (2019)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi Kasus Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan)	X <sub>1</sub> : Pendapatan Asli Daerah X <sub>2</sub> : Dana Alokasi Umum X <sub>3</sub> : Dana Alokasi Khusus X <sub>4</sub> : Dana Bagi Hasil Y: Belanja Modal.	Hasil peneliti menunjukkan secara parsial pendapatan asli daerah berpengaruh dan signifikan terhadap belanja modal kota Medan sedangkan secara parsial dana alokasi umum berpengaruh dan signifikan terhadap belanja modal kota Medan.
13.	Anjar Guritno dan Leny Suzan (2014)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pada kabupaten/kota di Bandung	X <sub>1</sub> : Pendapatan Asli Daerah X <sub>2</sub> : Dana Alokasi Umum Y: Belanja Modal.	Hasil peneliti menunjukkan secara simultan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal. Secara parsial Pendapatan Asli Daerah

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2020

(Lanjutan)

Tabel 1

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
		Raya Tahun 2008-2013		memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Belanja Modal, sedangkan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif namun tidak signifikan dikarenakan peningkatan Dana Alokasi Umum
14.	Meydin a Asri Raini, Leny Suzan, Dewa Putra Khrisna Mahard ika (2017)	<i>The influence of local own-source revenue, general allocation fund, and special allocation fund to budget realization of capital expenditure (empiric study on province in java island period 2009-2014)</i>	X <sub>1</sub> : <i>The influence of local own-source revenue</i> X <sub>2</sub> : <i>Special allocation fund</i> Y: <i>Budget realization of capital expenditure.</i>	Hasil peneliti menunjukkan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus secara bersama-sama mempengaruhi belanja modal. Secara parsial, Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif pada belanja modal, sedangkan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh pada belanja modal.

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2020

(Lanjutan)

Tabel 1

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
15.	Marsyaf Lawe Anasta (2016)	<i>The effect of regional original income (pad), general allocation funds (dau), special allocation funds (dak) and area of areas on capital expenditure (Case Study in Regency / City on Java Island.</i>	X <sub>1</sub> : <i>The effect of regional original income (PAD)</i> X <sub>2</sub> : <i>General allocation funds (DAU)</i> X <sub>3</sub> : <i>Special allocation funds (DAK) and area</i> Y: <i>Areas on capital expenditure.</i>	Hasil peneliti menunjukkan secara simultan variabel pendapatan lokal, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan ukuran area secara signifikan mempengaruhi belanja modal. Secara parsial, variabel pendapatan lokal, dana alokasi khusus, dan ukuran area berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.
16.	Muti'ah (2016)	<i>The Effect of Regional Revenue (RR), Revenue Sharing Fund, General Allocation</i>	X <sub>1</sub> : <i>The Effect of Regional Revenue</i> X <sub>2</sub> : <i>Revenue Sharing</i>	Hasil peneliti menunjukkan (RR) memiliki dampak positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional, Dana Bagi Hasil (RSF) memiliki

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2020

(Lanjutan)

Tabel 1

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
		<i>Fund and Special Allocation Fund on Regional Economic Growth (Empirical Study In the 33 provinces in Indonesia Year 2011-2014)</i>	<i>Fund X<sub>3</sub>: General Allocation Fund Y: Special Allocation Fund on Regional Economic Growth.</i>	dampak negatif pada Pertumbuhan Ekonomi regional, menjadi dana alokasi umum (GAF) dan alokasi khusus dana (SAF) tidak berdampak pada pertumbuhan ekonomi regional.
17.	Sukanto (2018)	<i>Specific Allocation Funds, Economic Growth, and Unemployment: A Case Study in Banten Province, Indonesia</i>	<i>X<sub>1</sub>: Specific Allocation Funds X<sub>2</sub>: Economic Growth Y: Unemployment : A Case Study in Banten Province Indonesian.</i>	Hasil peneliti menunjukkan Dana Alokasi Khusus tidak mempengaruhi belanja modal di wilayah kabupaten Indonesia, tetapi melakukannya di kota-kota. Dana alokasi khusus memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengangguran melalui transmisi belanja modal.

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2020

(Lanjutan)

Tabel 1

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
18.	Asnawi dan Zeni Sri Ulan (2018)	<i>The effect of regional original income (pad), general allocation funds (dau), and special allocation funds (dak) on capital expenditures in district and cities in java island</i>	<p>X<sub>1</sub>: <i>The effect of regional original income (PAD)</i></p> <p>X<sub>2</sub>: <i>General allocation funds (DAU)</i></p> <p>X<sub>3</sub>: <i>Special allocation funds (DAK)</i></p> <p>Y: <i>On capital expenditures in district and cities in java island</i></p>	<p>Hasil peneliti menunjukkan Pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, dana alokasi khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, pendapatan daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus secara bersamaan memiliki pengaruh terhadap pengeluaran modal pemerintah pulau Jawa.</p>

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2020

(Lanjutan)

Tabel 1

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
19.	Gounder, Neelesh., Narayan, Paresk Kumar., and Prasad, Arti. (2017)	<i>An Empirical investigation of the relationship between government revenue and expenditure on capital shopping: The Case of the Fiji Islands</i>	X <sub>1</sub> : Revenue X <sub>2</sub> : Expenditure Y: Capital Shopping	Hasil peneliti menunjukkan Pendapatan tidak berpengaruh terhadap belanja modal, sedangkan pengeluaran berpengaruh terhadap pengeluaran.
20.	Ari Juniawan (2018)	<i>The influence of pad, dau and dak on capital and district shopping in bali province</i>	X <sub>1</sub> : pendapatan asli daerah X <sub>2</sub> : dana alokasi umum X <sub>3</sub> : Dana alokasi khusus Y: Capital And District shopping	Hasil peneliti menunjukkan Pendapatan Daerah berpengaruh positif terhadap Pengeluaran Modal, Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Pengeluaran Modal, Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Pengeluaran Modal.

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2020

Dalam penelitian ini terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian sebelumnya, yaitu:

1. Pada penelitian ini peneliti menggunakan 2 (dua) variabel bebas (X) yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dengan 1 (satu) variabel terikat yaitu Belanja Modal. Sedangkan penelitian sebelumnya hanya menggunakan 2 (dua) variabel bebas (X) yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dengan 1 (satu) variabel terikat (Y) yaitu Belanja Modal.
2. Sampel dalam penelitian sebelumnya adalah kabupaten/kota di Jawa yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari tahun 2014-2016 yang diperoleh melalui *website* [www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id) dan sampel dalam penelitian ini yang digunakan yaitu Laporan Keuangan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari tahun 2015-2019. Data Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat melalui situs resmi Badan Pusat Statistik <https://jabar.bps.go.id/>. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan alat analisis yang digunakan adalah uji regresi berganda.
3. Periode penelitian ini dilakukan pada tahun 2020, sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan di bawah tahun 2018.

## 2.2 Kajian Pustaka

### 2.2.1 Teori Agensi

Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu. Konsep *Agency Theory* Menurut Scott (2015: 23) Teori agensi (*Agency Theori*) adalah hubungan atau kontrak antara *principal* dan *agent*, dimana *principal* adalah pihak yang

mempekerjakan *agent* agar melakukan tugas untuk kepentingan *principal*, sedangkan *agent* adalah pihak yang menjalankan kepentingan *principal*.

Kaitan teori agensi dalam penelitian ini dapat dilihat melalui hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam penyaluran dana perimbangan dan juga hubungan antara masyarakat yang diproksikan oleh DPRD (prinsipal) dengan pemerintah daerah (agen). Pemerintah pusat melakukan pelimpahan wewenang kepada pemerintah daerah dalam mengatur secara mandiri segala aktivitas pemerintahan di daerahnya. Oleh karena itu sebagai konsekuensi dari pelimpahan wewenang tersebut, pemerintah pusat menurunkan dana perimbangan yang tujuannya adalah membantu pemerintah daerah baik dalam mendanai kebutuhan pemerintahan sehari-hari maupun memberi pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat.

### 2.2.2 *Pendapatan Asli Daerah*

Menurut Nurcholis (2017: 182) Pendapatan Asli Daerah adalah:

“Pendapatan yang diperoleh dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain yang sah.”

Adapun menurut Halim (2014: 67) Pendapatan Asli Daerah adalah:

“Semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.”

Menurut Halim dan Nasir (2016: 44) Pendapatan Asli Daerah adalah:

“Pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pendapat dari para ahli dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah semua pendapatan yang diperoleh dari sumber ekonomi

daerah yang diatur oleh Undang-Undang yang berlaku. Desentralisasi mengakibatkan Pemda wajib mampu menggali penerimaan daerah yang peruntukannya mendanai kebutuhan daerah dalam rangka meningkatkan pengadaan sarana dan prasarana.

### 2.2.3 Dana Perimbangan

#### 2.2.3.1 Pengertian Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk daerah guna membiayai kebutuhan daerah.

Menurut Abdullah dan Halim (2015: 103) Dana Perimbangan adalah: “Transfer atau hibah yang dapat mewakili dari tidak meratanya keuangan dan ekonomi daerah. Selain itu transfer tujuan mengurangi keuangan horizontal antar daerah, mengurangi akuisisi vertikal Pusat-Daerah, mengatasi masalah keuangan publik antar daerah, dan untuk menciptakan keamanan keuangan di daerah.”

Menurut Hana Anjani Wiri, Wijaya (2015: 114) Dana Perimbangan adalah: “Pendukung pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah untuk pencapaian tujuan pemberian otonomi kepada daerah, terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat”.

Menurut Pheni Chalid, (2015: 16) Dana Perimbangan adalah: “Dana yang merupakan terdiri dari Bagi Hasil Pajak ,Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus.”

Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli maka dapat di simpulkan bahwa Dana Perimbangan adalah dana yang di transfer atau dihibahkan untuk menyamaratakan keuangan dan ekonomi daerah yang terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus.

### 2.2.3.2 Macam-macam Dana Perimbangan

Menurut Statistik Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa barat (2019: 4)

#### 1. Bagi Hasil Pajak

Bagi Hasil Pajak adalah bagian daerah yang berasal dari pendapatan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB), pendapatan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan (Pph) pasal 25 dan pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pph 21 Orang Pribadi (termasuk Pph Pasal 21) dan lain-lain.

#### 2. Bagi Hasil Bukan Pajak

Pendapatan bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam berasal dari pendapatan Iuran Pengusahaan Hutan (IHPH), Provinsi sumber daya alam kehutanan, dana reboisasi, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi dan pertambangan panas bumi.

#### 3. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum adalah transfer dana bagi pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk menutup kesenjangan *fiscal* (*fiscal gap*) dan pemerataan kemampuan fiskal antar daerah dalam rangka membantu kemandirian pemerintah daerah menjalankan fungsi dan tugasnya melayani masyarakat.

#### 4. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang disediakan kepada daerah untuk memenuhi kebutuhan khusus. Ada tiga kriteria dari kebutuhan khusus

seperti ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

1. Kebutuhan tidak dapat diperhitungkan dengan menggunakan rumus DAU Kebutuhan merupakan komitmen atau prioritas nasional Kebutuhan untuk membiayai kegiatan reboisasi dan penghijauan oleh daerah penghasil. Dengan demikian DAK pada dasarnya merupakan transfer yang bersifat spesifik untuk tujuan-tujuan yang sudah digariskan.

#### 2.2.4 *Belanja Modal*

##### 2.2.4.1 *Pengertian Belanja Modal*

Menurut Siregar (2015: 167) Belanja Modal adalah:

“Pengeluaran untuk pengadaan aset tetap. Dalam akuntansi berbasis akrual, pengeluaran untuk memperoleh aset tetap dikategorikan sebagai aset tetap. Karena itu tidak ada istilah "beban modal" sebagai padanan dari belanja modal. Alokasi belanja modal dibuat untuk menghasilkan aset tetap milik pemerintah daerah yang sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah dan masyarakat di daerah bersangkutan. Dalam perspektif penganggaran partisipatif, keterlibatan masyarakat diharapkan dapat memberikan masukan penting dalam memilih aset tetap yang akan diperoleh dari pelaksanaan anggaran belanja modal.”

Menurut Syaiful (2018: 19) Belanja Modal adalah:

“Pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap / inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.”

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (2014: 21) Belanja Modal adalah: “Pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap / inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.”

Berdasarkan pendapat dari para ahli dapat disimpulkan bahwa *Belanja Modal* adalah pengeluaran berupa aset tetap yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi yang didalamnya termasuk pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas atau kualitas aset yang dimana akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana perimbangan.

#### 2.2.4.2 *Macam-macam Kategori Belanja Modal*

Kategori belanja modal menurut Ghozali (2018: 233) adalah:

1. Pengeluaran mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang dengan demikian menambah aset Pemda,
2. Pengeluaran tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan oleh Pemda,
3. Perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

#### 2.2.4.3 *Jenis-Jenis Belanja Modal*

Menurut Sukarso (2017: 244) terdapat beberapa jenis belanja modal yaitu:

1. Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, peralatan, pematangan tanah, pembuatan

sertipikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran atau biaya yang akan digunakan untuk pengadaan atau penambahan atau penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan atau penambahan atau penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.
4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan atau penambahan atau penggantian / peningkatan pembangunan pembuatan serta perawatan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksudkan dalam kondisi siap pakai,
5. Belanja Modal Fisik lainnya adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan atau penambahan atau penggantian atau peningkatan pembangunan atau pembuatan serta perawatan terhadap Fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralata dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang

kesenian, barang peurbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah.

### 2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis

Kerangka pemikiran teoritis merupakan kerangka yang menggambarkan konsep pemikiran berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu terkait dengan variable yang akan diteliti. Kerangka ini menjelaskan keterkaitan antara variable independent yang terdiri atas ( $X_1$ ) Pendapatan Asli Daerah, ( $X_2$ ) Dana Perimbangan dengan variable dependent ( $Y$ ) Belanja Modal.

Kemampuan daerah dalam merealisasikan potensi ekonomi daerah menjadi sumber penerimaan daerah yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan daerah. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah diikuti pula dengan peningkatan Anggaran Belanja Modal yang signifikan sehingga Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal. Dana Alokasi Umum yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah dapat digunakan untuk membiayai fungsi layanan umum daerah (Darwanto, 2016: 245).

1. Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal
2. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal
3. Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal yang ditransfer ke Daerah diikuti oleh peningkatan Anggaran Belanja Modal sehingga terdapat pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap belanja modal pemerintah daerah.

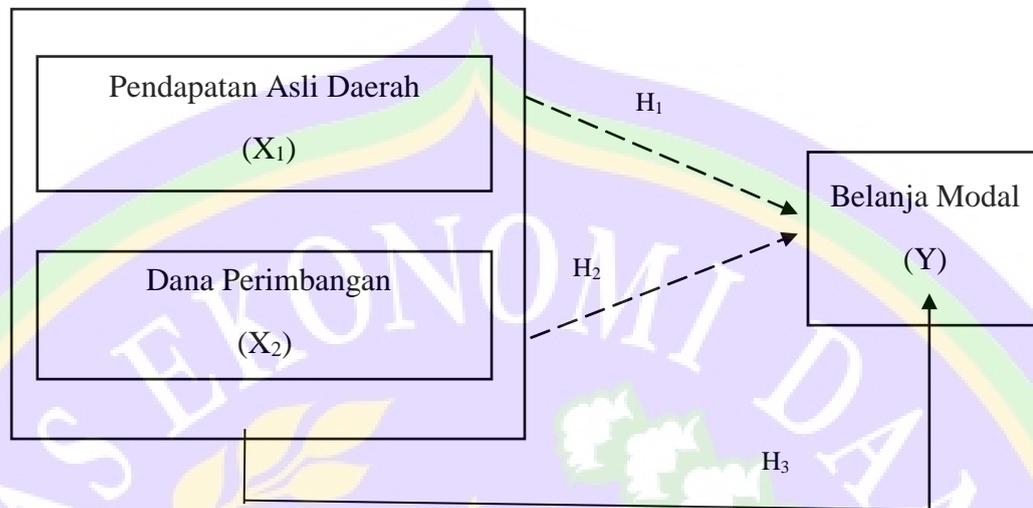
Menurut Susi Susanti dan Heru Fahlevi, (2016) Pendapatan Asli Daerah mengalami naik dan Belanja Modal turun, Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara negatif terhadap Belanja Modal dikarenakan tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Apabila Dana Perimbangan mengalami naik dan Belanja Modal naik maka disimpulkan berpengaruh positif karena mengindikasikan bahwa tinggi rendahnya tingkat penerimaan diikuti dengan alokasi anggaran belanja modal. Apabila Pendapatan Asli Daerah mengalami naik Dana Perimbangan turun dan belanja modal turun berpengaruh positif.

Menurut Hanisya Ursilla Lubis, (2019) Dana Perimbangan naik dan belanja modal naik berpengaruh positif karena masih bergantung dan kurangnya kemandirian pemerintah daerah di kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Barat.

Menurut Achmad David Hermawan, (2015) Pendapatan Asli Daerah mengalami naik dan Belanja Modal naik Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara positif terhadap Belanja Modal hal ini dikarenakan permintaan kebutuhan masyarakat meningkat. Pendapatan Asli Daerah mengalami naik, Dana Perimbangan dan Belanja Modal naik Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara positif terhadap Belanja Modal hal ini dikarenakan permintaan kebutuhan masyarakat meningkat.

Kerangka pemikiran teoritis yang menggambarkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yaitu mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal.

Kerangka Pemikiran Teoritis dalam model penelitian ini adalah :



Keterangan :

- : Pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen
- - - - - → : Pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen

**Gambar 1**

**Skema Kerangka Pemikiran Teoritis**

**2.4 Rumusan Hipotesis**

Berdasarkan atas kerangka penelitian teoritis yang telah diuraikan di atas, maka peneliti akan mengemukakan hipotesis sebagai dugaan sementara dari penelitian ini dan selanjutnya dapat diuji kebenarannya sebagai berikut:

H<sub>1</sub> : Secara parsial Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal.

H<sub>2</sub> : Secara parsial Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Belanja Modal.

H<sub>3</sub> : Secara simultan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Belanja Modal.



## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Barat, maka pada bagian akhir dari penelitian ini penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan tabel diatas, maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 1.002 + (-5.504)X_1 + (-0,050)X_2$$

Dari persamaan regresi linear berganda tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- 1) Konstanta sebesar 1.002, artinya jika variabel PAD ( $X_1$ ), Dana Perimbangan ( $X_2$ ), nilainya adalah 0, maka Belanja Modal (Y) nilainya adalah 1.002
- 2) Nilai koefisien regresi PAD ( $X_1$ ) sebesar -5.504, artinya jika variabel Dana Perimbangan ( $X_2$ ), bernilai tetap dan PAD ( $X_1$ ) mengalami kenaikan 1%, maka Belanja Modal (Y) akan mengalami kenaikan sebesar -5.504 dan sebaliknya.
- 3) Nilai Dana Perimbangan ( $X_2$ ) sebesar -0,050, artinya jika variabel PAD ( $X_1$ ), bernilai tetap, dan Dana Perimbangan ( $X_2$ ) mengalami kenaikan sebesar 1%, maka Belanja Modal (Y) akan mengalami penurunan sebesar -0,050 dan sebaliknya.

2. Hasil uji secara parsial variabel independen terhadap variabel dependen diperoleh :

1) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah ( $X_1$ ) terhadap Belanja Modal.

Berdasarkan pembahasan di atas dapat dinyatakan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah bahwa  $H_1$  diterima yang berarti Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Hal ini dapat dibuktikan dengan signifikansi variabel Pendapatan Asli Daerah yang lebih dari 0,05 ( $0,049 < 0,05$ ) bahwa  $H_1$  diterima yang berarti Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Dengan nilai  $t$  hitung sebesar  $2,064 > t$  tabel sebesar 2,051.

2) Pengaruh Dana Perimbangan ( $X_2$ ) memiliki  $t$  hitung sebesar  $2,255 > t$  tabel sebesar 2,051 dan nilai signifikansi  $0,032 < 0,05$ , bahwa  $H_2$  diterima yang berarti Dana Perimbangan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

3) Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal berdasarkan hasil uji hipotesis Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal. Dimana Pendapatan Asli Daerah memiliki hasil  $t$  hitung sebesar  $2,064 > t$  tabel sebesar 0,051 maka dapat disimpulkan  $H_1$  diterima Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh terhadap Belanja Modal. Dana Perimbangan menghasilkan  $f$  hitung sebesar 3,748 dan  $f$  tabel 3,35 ( $3,748 > 3,35$ )  $H_2$  diterima PAD secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Modal. Dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana

Perimbangan terhadap Belanja Modal secara bersama-sama berpengaruh simultan terhadap Belanja Modal.

- 4) Berdasarkan hasil uji hipotesis yaitu uji simultan, dapat kita lihat bahwa nilai regresi  $f$  hitung sebesar  $3.748 > f$  tabel  $3.35$  sebesar dan nilai signifikansi  $0,037 < 0,05$ , maka diterima yang artinya secara simultan variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal berarti secara simultan (bersama-sama) terdapat pengaruh yang signifikan oleh kedua variabel tersebut terhadap Belanja Modal.
- 5) Berdasarkan hasil Analisis Adjusted R Square ( $R^2$ ) dapat dilihat pada kolom Adjusted R Square bahwa diperoleh nilai sebesar Adjusted R Square sebesar  $0,159$ , hal ini dapat disimpulkan bahwa kemampuan variabel independent Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan untuk menjelaskan variasi pada variabel dependen Belanja Modal sebesar  $15,9\%$  yang menandakan bahwa hubungan koefisien sangat rendah dengan nilai  $(0,00-0,199)$ . Sisanya  $84,1\%$  dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.
- 6) Analisis Akuntansi
  - 1) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal adalah 18 data  $2,3\%$  berpengaruh positif dan 12 data atau  $3,2\%$  berpengaruh negatif.
  - 2) Pengaruh Dana Perimbangan (DP) terhadap Belanja Modal adalah 14 data atau  $4,4\%$  berpengaruh positif dan 16 data atau  $5,5\%$  berpengaruh negatif.

- 3) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan (DP), terhadap Belanja Modal adalah 15 data atau 59,25% berpengaruh positif dan 15 data atau 40,74% berpengaruh negatif.

## 1.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, maka saran yang diberikan pada peneliti adalah :

1. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor yang berasal dari retribusi daerah pada tahun 2019 rendah sebaiknya retribusi daerah jasa umum ditingkatkan kembali sehingga pelayanan publik bisa lebih optimal. Tahun 2017, pada Kabupaten Bandung pada Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan di Kabupaten Bandung terendah disarankan produktivitas perusahaan – perusahaan BUMD khususnya BPR (Bank Pengkreditan Rakyat) lebih ditingkatkan. Pada tahun 2017 hampir semua sektor Pendapatan Asli Daerah stabil kecuali di sector retribusi daerah yang perlu ditingkatkan contohnya retribusi jasa usaha untuk meningkatkan pendapatan usaha-usaha seperti tempat wisata. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan di kabupaten Karawang pada tahun 2017 mengalami penurunan yang sangat drastis dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sebaiknya perusahaan BUMD khususnya pada sektor LKM (Lembaga Keuangan Mikro) harus ditingkatkan agar usaha kecil menengah dapat berkembang sehingga dapat mendongkrak Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan.
2. Dana Perimbangan Kabupaten Bogor pada tahun 2015 mengalami kelonjakan sebaiknya dana tersebut digunakan untuk pembangunan di daerahnya

sehingga tidak ada dana yang berlebih. Tahun 2018 pada Kabupaten Bandung tinggi disarankan dapat mengurangi permintaan dana anggaran pendapatan belanja daerah karena apabila dana perimbangan mengalami penurunan dapat tidak bergantung dengan pemerintah pusat. Tahun 2019 pada Kota Bandung mengalami kenaikan maka agar tidak dapat mengalami kelebihan dana Kota Bandung seharusnya memanfaatkan dana dengan sebaik mungkin agar tidak mengalami kecurangan. Tahun 2019 pada Kabupaten Bekasi mengalami kenaikan disarankan daerah dapat mengurangi belanja daerah sehingga dapat sesuai dalam mengelola kebutuhan masyarakat dalam pemanfaatan dana penerimaan dari pemerintah daerah. Tahun 2019 pada Kabupaten Karawang mengalami peningkatan dalam penerimaan dana perimbangan yang tidak setara dengan Belanja Modal maka disarankan supaya seimbang atau stabil.

3. Berdasarkan hasil uji simultan terdapat 78,3% masih dipengaruhi oleh variabel lain. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah tahun penelitian atau menambah variabel seperti Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Alokasi Anggaran Belanja Daerah, dan Dana Bagi Hasil agar hasilnya lebih relevan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agung, A., Mantra, G., Indah, N., & Dewi, K. (2018). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) dan Dana Perimbangan Terhadap Pengembangan Infrastruktur pada Pemerintah Provinsi Bali*. 14(2), 66–79.
- Alfino. (2014;22). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat*. Jurnal hal 4-13 Repository: Universitas Riau. Pekanbaru.
- ANDI, Mathius Tandiontong. (2016). *Kualitas Audit dan Pengukurannya*. Bandung. Penerbit Alfabeta.
- Arikunto. (2016) *Analisis metode sampel jenuh*. Hal 120.
- Ari Juniawan, M., & santi suryantini, ni putu. (2018). *Pengaruh PAD , DAU DAN DAK Terhadap Belanja Modal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana , Bali , Indonesia ABSTRAK Otonomi daerah atau Desentralisasi pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menjelaskan kewajiban pemda untuk mengendalikan dae*. 7(3), 1255–1281.
- Arsyad, Lincoln. (2015). *Ekonomi Pembangunan*. YVJ'IS. Jakarta.
- Asri Raini, M., Suzan, L., & Putra Khirna Mahardika, D. (2017). *Alokasi Khusus Terhadap Realisasi Anggaran Belanja Modal ( Studi Empiris Pada Provinsi Se-Pulau Jawa Periode 2009-2014 ) The Influence Of Local Own-Source Revenue , General Allocation Fund , And Special Allocation Fund To Budget Realization Of Capital Exp*. 4(2), 1684–1691.
- Badrudin, (2014: 97), *Anggaran Pendapatan Belanja Daerah disetujui oleh DPRD dalam peraturan perundangan yang disebut Peraturan Daerah*.
- Badan Pusat Statistik Kota Bandung. (2015). *Produk Domestik Regional Bruto*.
- Bastian, Indra. (2012). *Akuntansi sektor publik suatu pengantar*. Erlangga, Jakarta.
- Dwirandra. (2016). *Efektivitas dan kemandirian keuangan*. Skripsi. Universitas Udayana. Bali

- Gede, D., Atika, Y., Kepramareni, P., & Gde, N. L. (2017). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Alokasi Belanja Modal Kabupaten/Kota Se-Bali*. 9(1), 15–29.
- Ghozali, Imam. (2016). *Aplikasi Multivariate Dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang
- Halim, Abdul. (2015). *Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat*, Jakarta Losa.
- Halim, Abdul. (2014). *Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat*.
- Husna, Asmaul dan Sofia. (2013). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dalam Pengembangan Wilayah Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau*. JEMI, Vol.4, No.2, Desember 2013.
- Jannah, R., Wahono, B., & Salim, M. agu. (2017). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dan Dana Bagi Hasil (Dbh) Terhadap Pengalokasian Belanja Modal (Studi Kasus Pemerintahan Kabupaten Gresik Periode 2009–2015)*. 07(17), 123–131.
- Juanda, B., Fauzi, A., & Mulatsih, S. (2018). *Specific Allocation Funds , Economic Growth , and Unemployment : A Case Study in Banten Province* ,. 8(9), 386–390. <https://doi.org/10.29322/IJSRP.8.9.2018.p8153>
- Marsyaf, & Anasta, L. (2019). *The Effect Of Regional Original Income ( Pad ), General Allocation Funds ( Dau ), Special Allocation Funds ( Dak ) And Area Of Areas On Capital Expenditure ( Case Study in Regency / City on Java Island in 2016 )*. 11(16), 121–131. <https://doi.org/10.7176/EJBM>
- Mahmudi. (2014). *Manajemen Keuangan Daerah*. Erlangga. Jakarta
- Mardiasmo. (2014). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Mardiasmo, (2019). *Akuntansi Sektor Publik. Edisi 4*. Yogyakarta. Markoso. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta Maslikah. Siti Haniatun. (2014). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Study Kasus pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa*

Mayasari, Luh Piitu Rani, dkk (2014). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Pemerintahan Kabupaten Buleleng*. eJournal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akunatansi Program SI. Vol. 2.

Murhani Kasdy, L., Nadirsyah, & Fahlevi, H. (2018). *Dan Implikasinya Pada Realisasi Belanja Modal Pada Pemerintahan Kabupaten / Kota Di Indonesia*. 4, 1–18.

Muti'ah. (2017). *The Effect of Regional Revenue , Revenue Sharing Fund , General Allocation Fund and Special Allocation Fund on Regional Economic Growth ( Empirical Study In the 33 provinces in Indonesia Year 2011-2014 )*. 8(8), 102–112.

Nuryaman dan Veronica Christina. (2015). *Metode Penelitian Akuntansi dan Bsinis. Cetakan Pertama*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Pardede dan dan Rehard Manurung. (2014). *Analisis Jalur (Path Analysis)*. Jakarta: Rineka Cipta.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun (2015) Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 102/PMK.02/2018 Tentang Komponen Biaya dalam Belanja Modal Daerah

Pontianak Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun (2014) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, 2013.

Putri, Zuwesty Eka. (2015). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten /Kota Di Provinsi Jawa Tengah Periode 2011-2014*. Jakarta. Jurnal Bisnis dan Manajemen, Vol. 5, No.2, Oktober 2015.

Saputra, Riyanda, Darwanis. (2014). *Pengaruh Belanja Modal terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Dampaknya Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh)*. Universitas Syah Kuala.

Siregar, Baldric. (2015). *Akuntansi Sektor Publik. Cetakan Pertama. Edisi Pertama*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.

Susanto, Edy dan Marhamah. (2016). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Umum (Dau), Dan Dana Alokasi Khusus (Dak) Terhadap*

*Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dengan Belanja Daerah Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada 29 Kabupaten Dan 9 Kota Di Jawa Timur).* JURNAL STIE SEMARANG, VOL 8, NO 1, Edisi Februari 2016 (ISSN : 2252-826)

Sukimo, Sadono. (2015). *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Edisi 1. Cetakan 21. Jakarta: Rajawali Pcrs.

Sujarweni, V.Wiratna.(2015). *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi. Cetakan Kesatu*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Sumarmi, Saptaningsih. (2018). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal Daerah Kahupalen/Kota di Provinsi D.I Yogyakarta..*

Suprayitno, Bambang. (2015). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Anggaran Belanja Modal Pemerintah Provinsi di Pulau Jawa*. Jumal Riset Akuntansi dan Perpajakan JRAP. Vol.2, No.1, Juni 2015, hal 106-112.ISSN 23391545.

*Tengah.Jawa Tengah: Program Studi Akuntansi Universitas Dian Nuswantoro Semarang.*

Titimmah dan Furqani, Astri. (2015). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Pemkab Suenep (Periode 2009-2013)*. Jumal "PERFORMANCE" Bisnis dan Akuntan. Vol. V, No.2, September 2015.

Ummu Khoiriah, (2015:19), *Pengalokasian sumber daya ke dalam anggaran belanja modal*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis pada Provinsi Sumatra.

Qonita, (2014: 23), *Desentralisasi pemerintah atau desentralisasi fiscal*. Website Wikipedia